

II. KERANGKA TEORITIS

3.1 Kerangka Pemikiran

Pemerintah harus lebih berperan aktif dalam meningkatkan pelayanan kebijakan kepada para petani tebu demi mencapai swasembada gula. Terutama para petani kecil dan menengah yang memiliki sumberdaya terbatas. Kebijakan dapat menjadi faktor pendukung utama kelancaran usaha tani dengan cara memberikan bantuan yang tepat sasaran. Petani sangatlah membutuhkan jaminan dan kenyamanan dalam melangsungkan usaha tani mereka. Memastikan kelancaran usaha tani kecil dan menengah menjadi salah satu solusi karena permasalahan bukan hanya disebabkan oleh tidak adanya sumberdaya, tetapi banyak faktor lain yang dapat menghambat kelangsungan usaha tani, salah satunya adalah kepastian dalam harga dan penjualan produk.

Permasalahan yang sering timbul adalah tidak adanya kepastian harga dalam penjualan tebu pada tingkat petani, penyebab tersebut terjadi karena tidak transparannya informasi mengenai tingkat rendemen dan dikuasanya koperasi dan lembaga-lembaga penunjang oleh para pihak-pihak tertentu saja yang merupakan bagian dari pabrik gula . Pada sisi lain pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam mencapai swasembada gula. Kebijakan tersebut juga didukung oleh pemerintah daerah Jawa Timur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2012, dimana dimuat tentang peraturan Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu yang mewajibkan pemerintah daerah jawa timur memberikan bantuan kepada para petani untuk meningkatkan rendemen tebu petani, dengan maksud memperkuat penjualan harga tebu petani.

Setiap petani memiliki karakteristik yang berbeda dalam menentukan preferensinya terhadap kebijakan pertanian komoditas tebu. Karakteristik petani sendiri meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan luas lahan usaha tani, yang dapat menjadi faktor penentu petani dalam menentukan preferensi apa yang diinginkan olehnya.

Permasalahan tidak adanya kepastian harga pada tingkat petani kecil komoditas tebu Desa Sidomulyo, diawali dengan adanya kebijakan import Gula Kristal Rafinasi (GRK). Kebijakan import yang diharapkan pemerintah dapat

memenuhi kebutuhan gula industri yang tidak berdampak pada petani tebu, justru memberikan dampak sebaliknya. Harga gula di tingkat konsumen mungkin tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, tetapi harga tebu pada tingkat petani justru mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena harga tebu pada tingkat pabrik gula menurun, dimana petani besar ataupun tengkulak saja harus rela mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. Keadaan tersebut berdampak langsung pada petani kecil yang tidak bisa menjual langsung ke pabrik gula karena tidak memiliki akses. Kondisi petani kecil yang hanya bisa menjual kepada petani besar atau tengkulak membuat petani kecil sering mendapatkan harga dibawah harga pokok penjualan mereka. Tentu hal tersebut sangatlah merugikan petani kecil yang mana akan berdampak pada keraguan dalam melakukan usaha tani tebu di musim tanam selanjutnya.

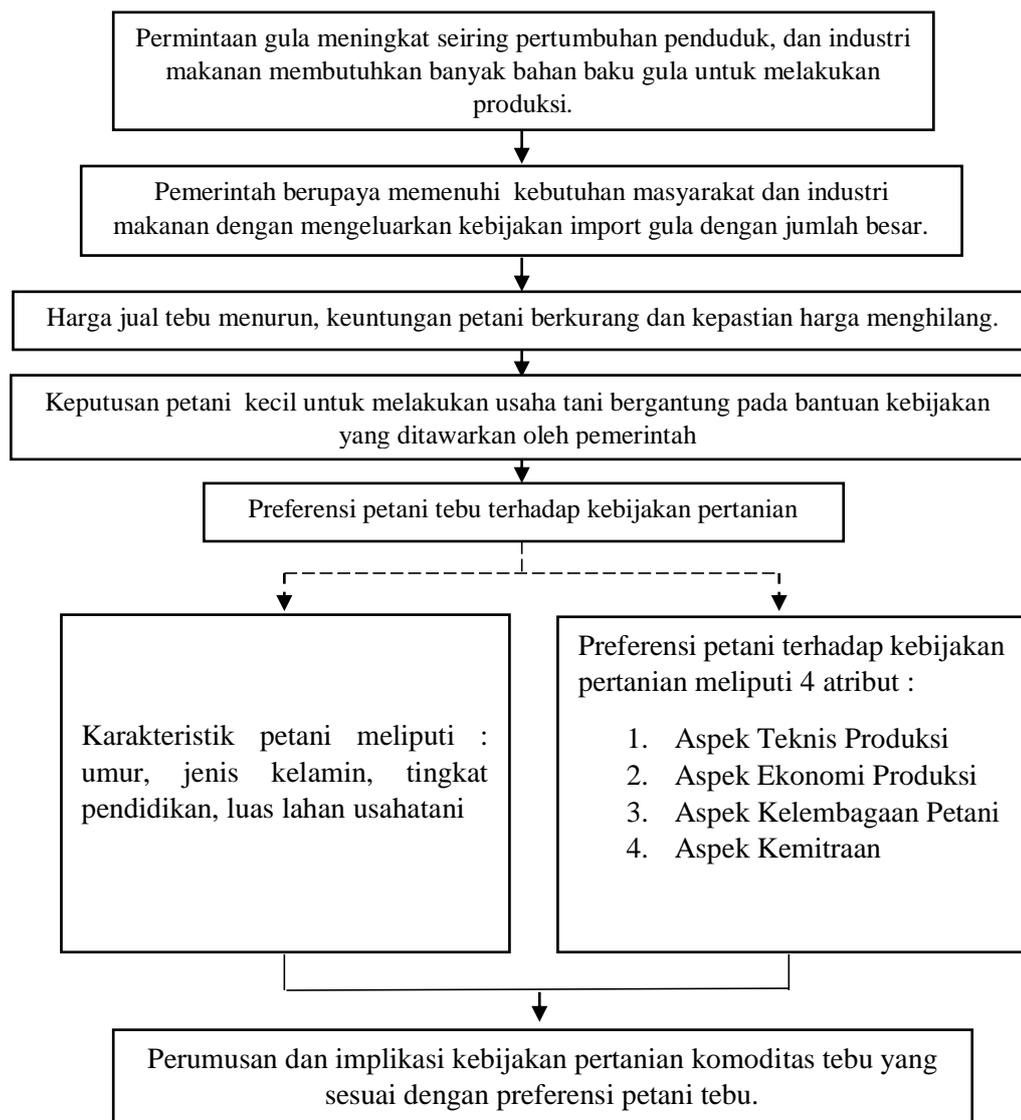
Peran pemerintah tentu sangatlah besar dalam memastikan kelangsungan usaha tani tebu para petani kecil. Hal tersebut disebabkan karena petani kecil komoditas tebu tidak memiliki pasar yang luas atau tidak bisa menjual langsung kepada konsumen, sehingga pemerintah harus mengetahui preferensi kebijakan petani kecil komoditas tebu.

Untuk memastikan keinginan petani, analisis konjoin dapat menjadi alat analisis yang memberikan solusi untuk mengetahui preferensi petani, dengan melakukan penelitian secara langsung melalui lapang, petani akan diminta memberikan penilaian dengan atribut dan tingkat atribut yang telah ditentukan. Petani juga diminta untuk memilih kebijakan yang telah diberikan atau kebijakan lainnya yang masuk kedalam pilihan untuk mengukur preferensi petani. Pada umumnya penelitian dengan analisis konjoin dapat memberikan hasil yang sama dengan keinginan responden (Boyle *et al.*, 2001). Selama beberapa dekade analisis konjoin telah banyak diterapkan dalam bidang sumberdaya ekonomi untuk memastikan preferensi pemangku kepentingan dalam melibatkan keputusan yang membutuhkan pengorbanan atau *trade-off* (Mackenzie, 1993; Boyle *et al.*, 2001). Pada penelitian teoritis dan empiris telah menunjukkan bahwa kolaborasi dan partisipasi para pelaku usaha termasuk petani sangatlah penting dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan suatu kebijakan yang berhasil (Brody, 2003; Portney, 2005, 2009).

Analisis konjoin memiliki konsep untuk mengetahui preferensi petani tebu. Dalam penelitian ini akan digunakan teknik analisis konjoin dalam pengolahan data. Teknik analisis konjoin sendiri merupakan metode yang digunakan untuk memberikan ukuran kuantitatif dari kepentingan relatif satu atribut dengan atribut lainnya (Aaker *et al.*, 2003). Penelitian ini menggunakan teknik analisis konjoin karena dapat menjadi salah satu metode yang bisa mendukung pengukuran preferensi petani. Analisis konjoin adalah teknik multivariat yang digunakan untuk mengetahui preferensi konsumen untuk mengetahui kombinasi beberapa produk dan mengetahui produk mana yang paling disukai konsumen. Pada suatu produk sendiri memiliki element-element yang dapat mendeskripsikan karakter produk tersebut (Hair *et al.*, 2006). Penggunaan metode ini mengasumsikan bahwa responden dapat melakukan skala penilaian numerik dengan menggunakan pengukuran skala interval. Responden dapat memberikan skala penilaian untuk memberikan perbedaan bermakna yang dapat melambangkan preferensi responden (Louviere *et al.*, 2005).

Sebagian besar penelitian yang berkaitan dengan dampak kebijakan perdesaan dan adopsi teknologi petani di negara berkembang didasarkan pada analisis pasca intervensi. Pemerintah jarang berkonsultasi dengan petani tentang keadaan spesifik maupun tentang preferensi mereka. Penelitian terkait kebijakan datang setelah biaya dikeluarkan dan teknologi telah menyebar, dengan hasil yang tidak tepat sasaran yang mengartikan tingkat keberhasilan kebijakan rendah (Feder *et al.*, 1981). Preferensi petani jarang muncul pada pertimbangan perumusan kebijakan, sedangkan apabila pemerintah mempertimbangkan preferensi petani dalam perumusan kebijakan dapat membantu membuat biaya yang dikeluarkan menjadi lebih efektif dan efisien (Batz *et al.*, 2003).

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep analisis konjoint untuk mengetahui preferensi petani terhadap kebijakan, sehingga dapat dibuat sebuah alur logika berpikir untuk menyelesaikan permasalahan tentang kurang tepatnya perumusan kebijakan pertanian komoditas tebu. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Perumusan Kebijakan Melalui Analisis Konjoin Untuk Melihat Preferensi Petani Tebu.

3.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan maka muncul hipotesis berupa dugaan sementara tentang kebijakan komoditas tebu. Kebijakan yang diinginkan petani tebu Desa Sidomulyo berupa aspek kemitraan, karena tidak semua petani tebu memiliki akses untuk menjual tebu mereka secara langsung ke pabrik gula terutama petani tebu kecil, tetapi dengan adanya kontrak farming antara petani tebu dan pabrik gula melalui pemerintah, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan petani tebu.

Menurut Santoso S (2017), pengujian hipotesis dalam analisis konjoint dilakukan melalui uji signifikansi, seperti yang dapat dituliskan sebagai berikut:

H_0 = Tidak ada korelasi yang kuat antara variabel estimates dan responden.

H_1 = Terdapat korelasi yang kuat antara variabel estimates dan responden.

Apabila probabilitas (*Significance*) >0.5 , maka H_0 diterima, dan jika probabilitas (*Significance*) <0.5 , maka H_0 ditolak, sehingga hipotesis yang dibuat pada penelitian ini dapat terbukti, apabila hasil analisis konjoin pada penelitian ini dapat memenuhi kriteria seperti diatas.

3.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini dilakukan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
2. Kebijakan pertanian komoditas tebu yang dijadikan atribut adalah kebijakan aspek teknis, aspek ekonomi produksi, aspek kelembagaan, dan aspek kemitraan yang di dalamnya terdapat taraf masing-masing atributnya.
3. Objek penelitian ini adalah petani tebu di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
4. Penelitian ini difokuskan pada preferensi petani terhadap atribut kebijakan pertanian komoditas tebu.

3.4 Definisi Operasional dan Variabel

Penelitian ini memiliki variabel yang memiliki definisi masing-masing. Untuk menghindari kemungkinan kesalahan dalam penafsiran kata, maka dibutuhkan penjelasan dalam setiap variabel. Berikut penjelasan tentang variabel dan indikator yang digunakan di dalam penelitian:

Tabel 1. Definisi Operasional Pokok Kebijakan

No.	Parameter	Definisi	Pengukuran variabel
1	Aspek Teknis Produksi	Aspek teknis produksi merupakan bantuan kebijakan dari pemerintah berupa fasilitas umum yang dapat menunjang kegiatan budidaya petani bahkan dapat menaikkan produktifitas pertanian mereka, seperti Kebijakan pembangunan irigasi, Perbaikan Unit Teknis - Demo plot, Perbaikan Unit Teknis – Penyuluhan.	5 : Sangat diinginkan; jika kebijakan pembangunan irigasi, perbaikan unit teknis demo plot, dan perbaikan unit teknis penyuluhan dirasa dapat bermanfaat untuk kelangsungan usahatani tebu. 4 : Diinginkan; jika terdapat satu kebijakan pilihan yang dirasa tidak bermanfaat untuk kelangsungan usahatani tebu. 3 : Cukup diinginkan; jika hanya salah satu kebijakan pilihan yang dirasa bermanfaat untuk kelangsungan usahatani tebu. 2 : Tidak diinginkan; jika semua kebijakan dirasa tidak bermanfaat untuk kelangsungan usahatani tebu. 1 : Sangat tidak diinginkan; jika semua kebijakan dirasa tidak bermanfaat dan justru dapat memberatkan atau menghambat kegiatan usahatani tebu.
2	Aspek Ekonomi Produksi	Aspek ekonomi produksi merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan untuk membantu petani dalam mengurangi biaya produksi mereka dan menjamin tidak adanya kerugian yang petani terima akibat suatu	5 : Sangat diinginkan; jika kebijakan harga hasil pertanian, kebijakan harga pupuk, dan perbaikan harga benih/bibit dirasa dapat bermanfaat untuk kelangsungan usahatani tebu. 4 : Diinginkan; jika terdapat satu kebijakan pilihan yang dirasa tidak bermanfaat untuk kelangsungan usahatani tebu.

No.	Parameter	Definisi	Pengukuran variabel
		permasalahan karena permasalahan yang timbul secara makro, seperti kebijakan harga hasil pertanian, kebijakan harga pupuk, dan kebijakan harga benih/bibit.	<p>3 : Cukup diinginkan; jika hanya salah satu kebijakan pilihan yang dirasa bermanfaat untuk kelangsungan usahatani tebu.</p> <p>2 : Tidak diinginkan; jika semua kebijakan dirasa tidak bermanfaat untuk kelangsungan usahatani tebu.</p> <p>1 : Sangat tidak diinginkan; jika semua kebijakan dirasa tidak bermanfaat dan justru dapat memberatkan atau menghambat kegiatan usahatani tebu.</p>
3	Aspek Kelembagaan Petani	Aspek kelembagaan petani merupakan bantuan kebijakan dari pemerintah berupa intervensi terhadap kelembagaan yang ada dan memberikan pelatihan-pelatihan untuk membuat sistem kelembagaan yang baik agar bisa memfasilitasi para petani tebu. Kebijakan tersebut berbentuk seperti pengembangan pertanian kawasan produksi, dan pengembangan koperasi tani.	<p>5 : Sangat diinginkan; jika kebijakan pengembangan pertanian kawasan produksi dan pengembangan koperasi tani dirasa dapat bermanfaat untuk kelangsungan usahatani tebu.</p> <p>4 : Diinginkan; jika terdapat satu kebijakan pilihan yang dirasa tidak bermanfaat untuk kelangsungan usahatani tebu.</p> <p>3 : Cukup diinginkan; jika menginginkan kebijakan pengembangan pertanian kawasan produksi dan pengembangan koperasi tani atau hanya salah satunya tetapi belum yakin akan manfaat dari kebijakan tersebut.</p> <p>2 : Tidak diinginkan; jika semua kebijakan dirasa tidak bermanfaat untuk kelangsungan usahatani tebu.</p> <p>1 : Sangat tidak diinginkan; jika semua kebijakan dirasa tidak bermanfaat dan justru dapat memberatkan atau menghambat kegiatan usahatani tebu.</p>
4	Aspek Kemitraan	Aspek kemitraan merupakan kebijakan dari pemerintah berupa Kebijakan Pengembangan kontrak farming, Temu usaha dengan pembeli hasil produksi.	<p>5 : Sangat diinginkan; jika kebijakan kontrak farming dan temu usaha dirasa dapat bermanfaat untuk kelangsungan usahatani tebu.</p> <p>4 : Diinginkan; jika terdapat satu kebijakan pilihan yang dirasa tidak bermanfaat untuk kelangsungan usahatani tebu.</p>

No.	Parameter	Definisi	Pengukuran variabel
			<p>3 : Cukup diinginkan; jika menginginkan kebijakan kontrak farming dan temu usaha atau hanya salah satunya tetapi belum yakin akan manfaat dari kebijakan tersebut.</p> <p>2 : Tidak diinginkan; jika semua kebijakan dirasa tidak bermanfaat untuk kelangsungan usahatani tebu.</p> <p>1 : Sangat tidak diinginkan; jika semua kebijakan dirasa tidak bermanfaat dan justru dapat memberatkan atau menghambat kegiatan usahatani tebu.</p>

Tabel 2. Definisi Operasional Aspek Teknis Produksi

No.	Parameter	Definisi	Pengukuran variabel
1	Pembangunan Irigasi	Kebijakan pembangunan irigasi merupakan bantuan yang berikan oleh pemerintah dengan membuat saluran irigasi baik berupa dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ke desa atau melalui pemerintah daerah.	<p>5 : Sangat diinginkan; jika kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada hasil usahatani tebu.</p> <p>4 : Diinginkan; jika kebijakan tersebut tidak berdampak langsung pada hasil usaha tani tebu tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama atau memiliki proses tertentu untuk dirasakan manfaatnya.</p> <p>3 : Cukup diinginkan; jika belum yakin akan manfaat kebijakan.</p> <p>2 : Tidak diinginkan; jika kebijakan dirasa tidak bermanfaat.</p> <p>1 : Sangat tidak diinginkan; jika kebijakan dirasa tidak bermanfaat dan justru dapat memberatkan petani.</p>
2	Perbaikan Unit Teknis - Demo plot	Perbaikan UT - Demo plot merupakan bantuan berupa uang atau pengiriman langsung pekerja untuk memperbaiki UT – Demo Plot	<p>5 : Sangat diinginkan; jika kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada hasil usahatani tebu.</p> <p>4 : Diinginkan; jika kebijakan tersebut tidak berdampak langsung pada hasil usaha tani tebu tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama atau memiliki proses tertentu untuk dirasakan manfaatnya.</p> <p>3 : Cukup diinginkan; jika belum yakin akan manfaat kebijakan.</p>

No.	Parameter	Definisi	Pengukuran variabel
			2 : Tidak diinginkan; jika kebijakan dirasa tidak bermanfaat. 1 : Sangat tidak diinginkan; jika kebijakan dirasa tidak bermanfaat dan justru dapat memberatkan petani.
3	Perbaikan Unit Teknis - Penyuluhan	Perbaikan UT - penyuluh merupakan bantuan berupa uang atau pengiriman langsung pekerja untuk memperbaiki UT – penyuluh.	5 : Sangat diinginkan; jika kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada hasil usahatani tebu. 4 : Diinginkan; jika kebijakan tersebut tidak berdampak langsung pada hasil usaha tani tebu tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama atau memiliki proses tertentu untuk dirasakan manfaatnya. 3 : Cukup diinginkan; jika belum yakin akan manfaat kebijakan. 2 : Tidak diinginkan; jika kebijakan dirasa tidak bermanfaat. 1 : Sangat tidak diinginkan; jika kebijakan dirasa tidak bermanfaat dan justru dapat memberatkan petani.

Tabel 3. Definisi Operasional Aspek Ekonomi Produksi

No.	Parameter	Definisi	Pengukuran variabel
1	Harga hasil pertanian	Kebijakan harga hasil pertanian merupakan bantuan pemerintah berupa kebijakan pemberian harga atap atau harga dasar.	5 : Sangat diinginkan; jika kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada hasil usahatani tebu. 4 : Diinginkan; jika kebijakan tersebut tidak berdampak langsung pada hasil usaha tani tebu tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama atau memiliki proses tertentu untuk dirasakan manfaatnya. 3 : Cukup diinginkan; jika belum yakin akan manfaat kebijakan. 2 : Tidak diinginkan; jika kebijakan dirasa tidak bermanfaat. 1 : Sangat tidak diinginkan; jika kebijakan dirasa tidak bermanfaat dan justru dapat memberatkan petani.

No.	Parameter	Definisi	Pengukuran variabel
2	Harga pupuk	Kebijakan harga pupuk merupakan bantuan pemerintah berupa subsidi pupuk yang diberikan secara tidak langsung	5 : Sangat diinginkan; jika kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada hasil usahatani tebu. 4 : Diinginkan; jika kebijakan tersebut tidak berdampak langsung pada hasil usaha tani tebu tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama atau memiliki proses tertentu untuk dirasakan manfaatnya. 3 : Cukup diinginkan; jika belum yakin akan manfaat kebijakan. 2 : Tidak diinginkan; jika kebijakan dirasa tidak bermanfaat. 1 : Sangat tidak diinginkan; jika kebijakan dirasa tidak bermanfaat dan justru dapat memberatkan petani. ⁵ (Sangat Diinginkan)
3	Harga bibit/benih	Kebijakan harga bibit/benih merupakan bantuan pemerintah berupa subsidi bibit/benih yang diberikan secara tidak langsung atau melalui pabrik-pabrik yang memproduksi benih/bibit tersebut.	5 : Sangat diinginkan; jika kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada hasil usahatani tebu. 4 : Diinginkan; jika kebijakan tersebut tidak berdampak langsung pada hasil usaha tani tebu tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama atau memiliki proses tertentu untuk dirasakan manfaatnya. 3 : Cukup diinginkan; jika belum yakin akan manfaat kebijakan. 2 : Tidak diinginkan; jika kebijakan dirasa tidak bermanfaat. 1 : Sangat tidak diinginkan; jika kebijakan dirasa tidak bermanfaat dan justru dapat memberatkan petani.

Tabel 4. Definisi Operasional Aspek Kelembagaan

No.	Parameter	Definisi	Pengukuran variabel
1	Pengembangan pertanian kawasan	Pengembangan pertanian kawasan merupakan bantuan pemerintah berupa sosialisasi atau pelatihan untuk memberikan pengetahuan kepada petani	5 : Sangat diinginkan; jika kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada hasil usahatani tebu. 4 : Diinginkan; jika kebijakan tersebut tidak berdampak langsung pada hasil usaha tani tebu tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama atau memiliki proses tertentu untuk dirasakan manfaatnya.

No.	Parameter	Definisi	Pengukuran variabel
		mengenai cara mengembangkan kawasan produksi	3 : Cukup diinginkan; jika belum yakin akan manfaat kebijakan. 2 : Tidak diinginkan; jika kebijakan dirasa tidak bermanfaat. 1 : Sangat tidak diinginkan; jika kebijakan dirasa tidak bermanfaat dan justru dapat memberatkan petani.
2	Pengembangan koperasi tani	Pengembangan koperasi tani merupakan bantuan pemerintah berupa sosialisasi atau pelatihan untuk anggota koperasi tani agar bisa mengembangkan koperasi tani mereka dan berupa intervensi peraturan demi menjaga koperasi yang baik.	5 : Sangat diinginkan; jika kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada hasil usahatani tebu. 4 : Diinginkan; jika kebijakan tersebut tidak berdampak langsung pada hasil usaha tani tebu tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama atau memiliki proses tertentu untuk dirasakan manfaatnya. 3 : Cukup diinginkan; jika belum yakin akan manfaat kebijakan. 2 : Tidak diinginkan; jika kebijakan dirasa tidak bermanfaat. 1 : Sangat tidak diinginkan; jika kebijakan dirasa tidak bermanfaat dan justru dapat memberatkan petani.

Tabel 5. Definisi Operasional Aspek Kemitraan

No.	Parameter	Definisi	Pengukuran variabel
1	Kontrak usaha tani	Kebijakan pengembangan kontrak farming merupakan langkah pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan kerjasama kepada perusahaan BUMN atau instansi pemerintah	5 : Sangat diinginkan; jika kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada hasil usahatani tebu. 4 : Diinginkan; jika kebijakan tersebut tidak berdampak langsung pada hasil usaha tani tebu tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama atau memiliki proses tertentu untuk dirasakan manfaatnya. 3 : Cukup diinginkan; jika belum yakin akan manfaat kebijakan. 2 : Tidak diinginkan; jika kebijakan dirasa tidak bermanfaat. 1 : Sangat tidak diinginkan; jika kebijakan dirasa tidak bermanfaat dan justru dapat memberatkan petani.

No.	Parameter	Definisi	Pengukuran variabel
2	Temu usaha	Temu usaha dengan pembeli hasil produksi merupakan langkah pemerintah untuk mempertemukan kelompok tani dengan para pelaku usaha swasta ataupun perusahaan BUMN yang memerlukan bahan baku pertanian	<p>5 : Sangat diinginkan; jika kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada hasil usahatani tebu.</p> <p>4 : Diinginkan; jika kebijakan tersebut tidak berdampak langsung pada hasil usaha tani tebu tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama atau memiliki proses tertentu untuk dirasakan manfaatnya.</p> <p>3 : Cukup diinginkan; jika belum yakin akan manfaat kebijakan.</p> <p>2 : Tidak diinginkan; jika kebijakan dirasa tidak bermanfaat.</p> <p>1 : Sangat tidak diinginkan; jika kebijakan dirasa tidak bermanfaat dan justru dapat memberatkan petani.</p>